

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
PADA SMA NEGERI 1 SRAGEN DAN SMA NEGERI 1
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN



TESIS

Disusun oleh :

AGUS SUHONO

N I M. : Q 100040102
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sekolah

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu jawaban menghadapi tantangan era globalisasi, maka guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin handal merupakan tugas yang harus diemban oleh lembaga-lembaga ataupun pelaksana pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong, adalah lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dituntut agar dapat melakukan reorientasi dan redefinisinya agar sepadan dan bahkan selangkah lebih maju dibandingkan SLTA umum yang lain di dalam menyiapkan kompetensi sumber daya yang dimiliki, serta pengelolaan input, proses dan outputnya.

Inovasi terhadap pendidikan selalu dilakukan pemerintah terutama mengenai materi pendidikan agar dapat menyentuh kebutuhan riil kehidupan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menunjang kemajuan peradaban manusia. Untuk itulah dikeluarkan kurikulum baru yakni; *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, sekalipun pelaksanaan secara riil baru dalam tahap persiapan atau permulaan.

“Hasil analisis yang mendalam terhadap keadaan dan kebutuhan nyata peserta didik, menunjukkan perlunya pembaharuan kurikulum agar dapat menghadapi tantangan masa depan secara mandiri, kritis, rasional dan kreatif”. (Boediono, 2002 : 3).

“Perbaikan kurikulum harus mengacu kepada agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa karena perencanaan pembangunan pendidikan tidak akan pernah selesai dan berhenti di satu titik”. Suyanto dalam (Barnadib, 2002 : 87). “Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan langkah pembaharuan dan pemberdayaan dalam rangka sistem pendidikan nasional”. (Hardjo Soemantri, 2002 : VII). Di sisi lain pembangunan pendidikan diarahkan pada sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi pendidikan. “Akibat sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dan menekankan keseragaman atau uniformitas telah menyebabkan banyak penderitaan terhadap proses panjang perjalanan pendidikan di Indonesia” Djohar dalam (Pembayun, 2002 : 11). Menunjukkan gejala-gejala tidak sehat atau penderitaan pendidikan seperti yang terjadi pada pendidikan kita sekarang tidak dapat dibanggakan karena sangat membelenggu, sebagai akibat sistem sentralistik pendidikan. Dampak lain adalah munculnya ketidakberdayaan akibat kehilangan kemerdekaan dalam komponen penyelenggaraan pendidikan, tidak mampu mengakomodasi pluralisme dan diskriminatif, serta menggali potensi-potensi yang dimiliki.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang didesain dengan didasarkan pada pengertian, struktur, dan pelaksanaan kurikulum. “Ada empat pilar yang menopang KBK, yaitu Kurikulum dan Hasil Belajar, Penilaian Berbasis Kelas, Kegiatan Belajar Mengajar, dan pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah”. (Boediono, 2002 : 7), Keempat pilar tersebut menjadi satu sistem KBK yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam pengertian kurikulum yang menjadi fokus adalah pengertian kompetensi dan kurikulum yang

berbasis kompetensi, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, komponen-komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tujuan penyelenggaraan sekolah dan kompetensi lulusan. Dalam struktur kurikulum yang berbasis kompetensi, fokus perhatian diarahkan pada jenjang pendidikan yang dimulai dari jenjang terendah yaitu, Taman Kanak-kanak dan Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Fokus perhatian dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah : “pengorganisasian kurikulum, pembelajaran, dan penilaian”.

Di sisi lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan rendahnya mutu pendidikan. Adanya sinyalemen lebih dari tiga perempat TKI yang dikirim ke Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi hanya berkelas sebagai pembantu rumah tangga, buruh bangunan, buruh pekerjaan, sopir, dan tukang kayu. Kualitas pengetahuan mereka yang rendah dan ditambah minimnya kemampuan berbahasa Inggris menyebabkan para pekerja itu hanya di level pembantu rumah tangga, buruh, dan tukang. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas pendidikan kita rendah, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam krisis multidimensional. Oleh karena itu diupayakan peningkatan mutu pendidikan baik secara formal maupun non formal dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan terhadap sistem secara menyeluruh. Dalam hal ini bisa dilakukan secara konvensional maupun secara inovatif oleh pemerintah. Namun kenyataan yang terjadi pada pendidikan di negara kita perhatian pemerintah belum optimal.

“Sebagaimana dikatakan oleh; Prof. Dr. Sudijarto Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Undang-undang Dasar Negara di dunia ini khususnya di Asia Tenggara hanya UUD Republik Indonesia yang secara jelas menyebutkan kata-kata” ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun ironisnya, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai ketimpangan terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya perhatian pemerintah dan masyarakat masih sangat kurang di dalam usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia dibanding dengan negara-negara tetangga lain”. (Tilaar, 2002 : 85).

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara pengembangan kurikulum, dimana kurikulum merupakan sebuah sarana atau alat dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. “Kunci utama untuk mencapai keberhasilan tujuan sekolah terletak pada kurikulum, yang merupakan jantung dalam proses pendidikan” (Sukmadinata, 2002 : 24), jadi kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam proses pendidikan di dalam semua jenjang dan jenis sekolah, kurikulum mengarah segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan.

Sebagai upaya pengembangan kurikulum, pemerintah berusaha melakukan penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal sebagaimana yang disampaikan (Karim, 2002 : 1) secara yuridis perlunya penyempurnaan Kurikulum 1994 dan suplemennya termaksud dalam GBHN tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam bidang pendidikan perlu melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis secara profesional”.

Untuk proses Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada jenjang sekolah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada banyak unsur yang sangat berpengaruh secara signifikan, dalam hal ini akan dikaji

pada sisi kesiapan Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Keterlibatan guru dan *stackholders* dalam pengambilan keputusan-keputusan SMA juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap SMA yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut sebagaimana yang termaksud dalam tujuan utama dimunculkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), adalah memandirikan dan memberdayakan SMA dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai dengan kondisi lingkungan atau potensi yang ada. Selanjutnya diharapkan pemberian wewenang (otonomi) kepada kepala sekolah diharapkan dapat mendorong SMA untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Di samping lulusan yang kompeten, peningkatan mutu dalam KBK antara lain akan diperoleh melalui reformasi SMA (*school reform*), yang ditandai dengan peningkatan partisipasi orang tua, kerjasama dengan dunia industri, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesional guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkan budaya mutu dalam suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan akan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), memberi peluang bagi guru dan pengelola SMA untuk melakukan inovasi dan improvisasi di SMA, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreatifitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Upaya melibatkan

masyarakat dalam pengembangan kurikulum mendorong SMA untuk lebih terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepada SMA untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru dan petugas lainnya yang ada di lingkungan SMA. Dengan demikian, SMA diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (*output*), dan dampak (*outcome*), serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan terutama untuk menjamin mutu secara menyeluruh (*total quality*), dan menciptakan proses perbaikan yang berkesinambungan (*continues improvement*); karena perbaikan tak kenal kata berhenti.

Karena kurikulum yang ditawarkan merupakan bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang berjalan selama ini, maka pembaharuan ini harus diwaspadai dengan mengkaji berbagai sumber dan mendesiminasikannya kepada berbagai pihak terutama pada pelaksana dan calon pelaksana di lapangan, agar tidak salah tafsir dan salah kaprah dalam penerapannya. Faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kesiapan aparat palaksananya. Kesiapan ini sangat ditentukan oleh para pelaku (guru). Kesiapan ini juga menyangkut kemampuan dalam mengajukan argumentasi, rasionalisasi dan berbagai sudut pandang untuk mendukung perlu diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian dan penelitian tentang kesiapan-kesiapan apa saja yang

dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen dilaksanakan tahun pelajaran 2004/2005 mulai Kelas X semester I.

Hal-hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis, hingga sejauh mana kesiapan SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen di dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memandang bahwa pemahaman dan kesiapan Kepala Sekolah, Guru serta Staff, dan kelengkapan sarana prasarana memegang peranan yang sangat menentukan dalam mengantarkan keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) termasuk analisis potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi dalam setting persekolahan, yang dalam hal ini adalah lingkungan SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen.

Berdasarkan survei pendahuluan dari penelitian ini diperoleh banyak informasi tentang masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen, diantaranya masalah yang dapat teridentifikasi.

1. Belum sepenuhnya memahami baik Kepala Sekolah, Guru dan Staff serta Siswa mengenai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dilaksanakan.
2. Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai, guna mendukung pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
3. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
4. Belum dilaksanakan sepenuhnya bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan (akuntabilitas).
5. Belum maksimalnya dorongan dan harapan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya.
6. Kurangnya kerjasama (team work) terhadap seluruh warga sekolah.
7. Belum optimalnya usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan baik yang akademis maupun non akademis.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada lingkup pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen.

Sedangkan pokok permasalahan yang diungkap.

1. Pemahaman Kepala Sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
2. Pemahaman, dan kesiapan para guru di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

3. Tanggapan mengenai pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
4. Kesiapan sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut penulis mengemukakan rumusan tiga masalah.

1. Bagaimana pemahaman mengenai Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen ?
- 3 Bagaimana tanggapan warga sekolah pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen, mengenai penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini.

- a. Untuk mengetahui pemahaman Kepala Sekolah, guru, karyawan dan siswa di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen

- c. Untuk mengetahui tanggapan warga sekolah atas penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini bermanfaat secara teoritis karena memberikan sumbangan dalam membangun konsep-konsep pemahaman dan kesiapan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Penelitian ini menghasilkan temuan pada kesiapan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri secara dini. Temuan tersebut berupa analisis, kendala-kendala yang ada, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dengan deskripsinya adalah Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis hasil penelitian ini sebagai berikut.

- a. Dapat dijadikan data atau bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, terutama untuk SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong, Stake holder, Departemen Pendidikan Nasional, dan warga masyarakat.
- b. Dapat dijadikan data masukan pihak-pihak pengelola pendidikan tentang pola pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

- c. Dapat membantu warga sekolah SMA Negeri 1 Sragen dan SMA Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen di dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan dengan menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).